

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Analisis Kinerja Pendapatan.
 - a. Kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Lembata dilihat dari analisis varians adalah dikatakan cukup baik karena realisasi pendapatan selalu melebihi jumlah yang dianggarkan.
 - b. Kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Lembata dilihat dari analisis Pertumbuhan Pendapatan adalah dikatakan cukup baik walaupun terjadi fluktuasi namun kinerja pertumbuhan pendapatannya positif.
 - c. Kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Lembata dilihat dari Analisis Derajat Desentralisasi adalah masih dikatakan rendah, walaupun mengalami peningkatan persentase pada setiap tahunnya, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lembata belum memberikan kontribusi kepada total Pendapatan Daerah.
 - d. Kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Lembata dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata masih sangat bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat.

- e Kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Lembata dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengalami pertumbuhan positif namun masih dikategorikan kurang dengan rata-rata persentasenya adalah 18,53%, sehingga Pemerintah Kabupaten Lembata masih belum mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya.
- f Kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Lembata dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan sangat efektif dengan rata-rata persentasenya adalah sebesar 105,20%.
- g Kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Lembata dilihat dari Rasio Efektivitas Pajak Daerah dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentasenya adalah 105,06%.

2. Analisis Kinerja Belanja

- a Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten Lembata dilihat dari Analisis varians Belanja dikatakan baik atau selisih yang disukai, karena dalam hal ini realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Lembata lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan.
- b Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten Lembata dilihat dari Analisis Pertumbuhan Belanja adalah pertumbuhannya mengalami pertumbuhan positif. Dengan demikian dapat dinilai bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata mampu melakukan penghematan anggaran belanja.

- c Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten Lembata dilihat dari Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja dan Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja adalah sebagian besar dana yang dialokasikan dair total belanja daerah lebih diprioritaskan untuk belanja operasi atau belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran.
- d Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten Lembata dilihat dari Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata lebih mengutamakan aktivitas belanja tidak langsung dimana belanja ini merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung.
- e Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten Lembata dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata telah melakukan efisiensi belanja atau penghematan selama tiga tahun anggaran tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan adalah:

1. Analisis Kinerja Pendapatan

Pada analisis kinerja pendapatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata perlu meningkatkan kinerja Pendapatan terutama pada bagian pendapatan daerah khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat menjadi lebih rendah serta sebagai solusi untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi (PAD) Nusa Tenggara Timur.

2. Analisis Kinerja Belanja

Pada analisis kinerja belanja, Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata telah melakukan kinerja yang cukup baik, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Lembata harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pondok Edukasi, Solo.
- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Astuti, E. 2007 dalam Halim, A dan Damayanti, T. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFE, Yogyakarta.
- Rosalina, Eka. 2008. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus di di Provinsi Sumatera Barat.Thesis S2)*. Universitas Gadjah Mada
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN
- Halim, Abdul. 2002b. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andy Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Ritonga, Irwan, T. 2009. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.

Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991).

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.